



DOKUMEN KUALIFIKASI

Nomor: DOKTEN-01/POKJA-1/PL.04.03/I/BSN-2024

Tanggal: 10 Januari 2024

untuk

Pengadaan

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR Map dalam
Rangka Layanan GPRS Connection

POKJA UKPBJ 1 TA. 2024

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Tahun Anggaran: 2024

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. UMUM

1. LINGKUP PEKERJAAN

1.1. Kode RUP: 46585009.

1.2. Nama paket pengadaan: Pekerjaan Perpanjangan *Data Service* Aplikasi *SAR MAP* dalam Rangka Layanan GPRS Connection.

1.3. Uraian singkat paket pengadaan: Pekerjaan Perpanjangan *Data Service* Aplikasi *SAR MAP* dalam Rangka Layanan *GPRS Connection*.

1.4. Nama Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

1.5. Nama UKPBJ: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/UKPBJ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

1.6. Nama Pokja Pemilihan: POKJA UKPBJ 1 TA. 2024.

1.7. Alamat Pokja Pemilihan: Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Jalan Angkasa Blok B15 Kav. 2-3 Kemayoran Jakarta Pusat

1.8. *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah: www.basarnas.go.id

1.9. *Website* UKPBJ: www.basarnas.go.id

1.10. *Website* SPSE: <https://lpse.basarnas.go.id/eproc4/>
2. SUMBER DANA

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024.

C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI

13.2 Bentuk Data Kualifikasi

- a. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha
1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.

a. Surat Izin: NIB.

b. Bidang Usaha: (46512) Bidang Perdagangan Besar Piranti Lunak

c. Kualifikasi usaha: Non Kecil

2. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

4. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan

d. Kartu Tanda Penduduk.

5. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menyetujui Surat Pernyataan peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan
 - h. pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

b. Syarat kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan

- 1) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- 2) memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
- 3) mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi status Wajib Pajak
- 4) menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5) menyetujui Pernyataan berisi:
- tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

c. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia (apabila diperlukan)

1) Memiliki pengalaman:

- | | |
|---|--|
| <p>a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan</p> <p>b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok (grup) yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.</p> <p>c) untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran;</p> <p>d) untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.</p> | <p>a) Penyediaan barang pada divisi 61: Jasa perdagangan besar.</p> <p>b) Penyediaan barang pada kelompok (grup) 611: Jasa perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak</p> |
|---|--|

2) Ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) dikecualikan bagi pelaku usaha dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purnajual (jika diperlukan).

- a. Memiliki tenaga ahli di bidang (jika diperlukan) : Tidak dipersyaratkan
- b. Memiliki tenaga teknis/terampil di bidang (jika diperlukan) : Tidak dipersyaratkan
- c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan (jika diperlukan) : Tidak dipersyaratkan
- d. layanan purnajual (jika diperlukan) : Sesuai terlampir pada dokumen spesifikasi teknis yang diupload oleh user PPK.

16. Penyampaian Dokumen Kualifikasi

16.1 Jadwal pelaksanaan:

Pemberian Penjelasan Kualifikasi:

Hari: _____

Tanggal : _____

Waktu : _____

Pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi :

Hari/Tanggal : _____ s/d _____

Waktu : _____

Pemberitahuan Hasil Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi:

Hari: _____

Tanggal : _____

Waktu : _____